

## SEJARAH PERUBAHAN STATUS ADMINISTRASI GRESIK DARI KABUPATEN SURABAYA MENJADI KABUPATEN GRESIK TAHUN 1974

**UMI FADLILAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [umifadlilah16040284010@mhs.unesa.ac.id](mailto:umifadlilah16040284010@mhs.unesa.ac.id)

**Artono**

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Pada tahun 1965, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, lima kecamatan di Kabupaten Surabaya (kini menjadi Gresik) dimasukkan kedalam wilayah Kota Madya Surabaya. Kebijakan ini secara tidak langsung menimbulkan kepincangan karena semakin menjauhkan ibu kota kabupaten (Gresik) dengan wilayah yang diperintah. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, selama Pelita I pembangunan sarana dan prasarana digalakkan untuk keperluan pemerintahan di Gresik beberapa diantaranya seperti dibangunnya gedung-gedung pemerintahan baik gedung kabupaten, kantor kecamatan, balai desa, maupun sarana prasarana non pemerintahan seperti sekolah, terminal, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini membahas tentang (1) latar belakang perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (2) proses peralihan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (3) Perkembangan Kota Gresik setelah menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan latar belakang perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (2) Menjelaskan proses peralihan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974; (3) Menganalisis pengaruh perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan penelitian, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan). Tahap heuristik digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penelitian baik berupa arsip, buku, surat kabar, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Tahap kritik berupa kritik sumber yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat keaslian sumber dan tingkat kredibilitas agar terhindar dari kepalsuan. Tahap interpretasi berdasarkan sumber literasi yang didapat, diperoleh sebuah penafsiran bahwa Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik pada tahun 1974 di latar belakang oleh berbagai faktor, baik faktor langsung maupun tidak langsung, setelah melewati proses yang panjang Gresik resmi menjadi kabupaten mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Selanjutnya, tahapan historiografi digunakan untuk menuliskan kembali peristiwa sejarah secara kronologis dan relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, nama Kabupaten Surabaya dirubah menjadi Kabupaten Gresik. Sejak disahkannya Kabupaten Gresik menjadi kabupaten baru pada tanggal 27 Februari 1975 secara resmi nama Kabupaten Surabaya terhapus. Beberapa pengaruh yang muncul berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Gresik tahun 1974 adalah semakin digalakkannya proyek pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Gresik pada masa Bupati Soefelan yang merupakan bupati pertama Kabupaten Gresik, hal ini bertujuan agar dapat menunjang kemajuan Kabupaten Gresik pasca menjadi kabupaten mandiri, selain itu juga pengaruh positif juga terlihat pada sektor industri yang semakin banyak bermunculan di Kabupaten Gresik, tercatat ada sebanyak 10 pabrik yang dibangun pasca Gresik menjadi kabupaten dan terdiri dari Pabrik Milik Asing (PMA) dan Pabrik Milik Dalam Negeri (PMDN).

**Kata Kunci:** perubahan status, administrasi Gresik, kabupaten.

### Abstract

*In 1965, based on Law No. 2 of 1965, five sub-districts in Surabaya Regency (now Gresik) were included in the City of Surabaya. This policy did not distance the district capital (Gresik) from the regulated territory. Several attempts were made to overcome this problem, during Pelita I the construction of facilities and infrastructure was carried out for the purpose of developing Gresik Regency. Several developments have been carried out such as district government*

buildings, sub-district offices, village halls, non-development infrastructure such as schools, terminals, hospitals, bridges, and so on.

This research discusses (1) the background of changing the administrative status of Gresik from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (2) the transition process from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (3) The development of Gresik City after becoming an independent district in 1974. This research aims to (1) Describe the background of changing the administrative status of Gresik Regency from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (2) Explain the transition process from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (3) Analyzing the effect of changes in Gresik administrative status from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974. This study uses a historical research method which consists of four stages of research, namely heuristics (source collection), criticism (source verification), interpretation (interpretation), and historiography (writing). The heuristic phase is used to obtain research sources in the form of archives, books, newspapers, journals, and other scientific articles to support this research. The stage of criticism in the form of source of criticism is carried out in order to see the level of authenticity of the source and the level of credibility to avoid falsehood. The interpretation phase is based on the literacy sources obtained, the interpretation is obtained that the Changes in Gresik Administration Status from Surabaya Regency in 1974 were motivated by various factors, both direct and indirect factors, after going through a long process Gresik officially became an independent district based on Government Regulation No. 38/1974. The historiographic stage is used to rewrite historical events in a chronological and relevant way.

The results of this research indicate that in 1974, based on Government Regulation No. 38/1974, the name of Surabaya Regency was changed to Gresik Regency. Since the legalization of Gresik Regency became a new district on February 27, 1975 the name of Surabaya Regency was officially erased. Some influences that appear related to the formation of Gresik Regency in 1974 are the promotion of infrastructure development projects in Gresik Regency during the Soefelan Regent who was the first regent of Gresik Regency. Positive results can also be seen in the growing industrial sector in Gresik Regency, as many as 10 factories were built after Gresik became districts and consisted of Foreign-Owned Factories (PMA) and Domestic-Owned Factories (PMDN).

**Keywords:** status change, gresik administration, regency.

## PENDAHULUAN

Studi mengenai sejarah perkembangan kota saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan studi ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan kontemporer tentang masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang mulai bergeser ke wilayah perkotaan.<sup>1</sup> Wilayah kabupaten atau perkotaan mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing. Berbagai aktifitas masyarakat telah membentuk pola kehidupan yang dinamis di dalamnya, seperti halnya yang terjadi di Gresik.

Kabupaten atau kota di Indonesia merupakan pembagian wilayah administratif yang berada dibawah provinsi, diketuai oleh seorang bupati, dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Gresik merupakan sebuah kota kuno di Jawa dengan memiliki wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai, dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Adapun istilah Gresik sendiri memiliki banyak penafsiran, beberapa diantaranya terdapat istilah 'Qorrosyaik' yang berasal dari Bahasa Arab, 'Giri-Gisik' yang berasal dari bahasa Jawa, penulis asing menyebut Gresik dengan sebutan *Grissee*, *Gerawasi*, *Agasi*, berita Cina menyebut Gresik dengan sebutan *T'se-t'sun* atau "Kersih". Solichin Salam dalam bukunya yang berjudul 'Sejarah Islam di Jawa' menyebut dengan istilah 'Giri-Isa'

yang merupakan ungkapan dari kata 'Giri' yang berarti bukit dan 'Isa' yang berarti raja.<sup>2</sup>

Pada abad ke-14, Gresik telah menjadi kota perdagangan yang sangat penting. Menurut Tome Pires (Portugis) yang pernah mengunjungi Gresik pada abad ke-16, ia menyaksikan bahwa Gresik pada saat itu sudah menjadi kota dagang yang ramai. Kapal-kapal yang berasal dari berbagai daerah bahkan luar daerah pernah singgah di pelabuhan Gresik, diantaranya ada yang berasal dari Maluku, Aceh, Gujarat, Siam, dan Cina.<sup>3</sup>

Letak yang strategis inilah yang menunjang Gresik untuk menjadi kota yang lebih berkembang. Keberadaan pelabuhan Gresik menjadi sangat penting pada saat itu. Bahkan mampu menandingi pelabuhan-pelabuhan besar yang sebelumnya telah lebih dulu ada.

Sebelum Gresik menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974, Gresik merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Surabaya dengan menyandang status sebagai kawedanan. Hal ini dikarenakan ketika kebijakan penataan kota yang diterapkan oleh Kolonial Belanda, kondisi Gresik luluh lantak oleh karena 'perebutan' kekuasaan politik. Ketika Belanda ingin membangun pelabuhan modern, kondisi pelabuhan di Gresik mengalami pendangkalan. Akibatnya, pelabuhan Gresik pun ditinggal oleh Belanda yang kemudian beralih ke Surabaya.<sup>4</sup> Surabaya pun berkembang pesat, dan Gresik menjadi semakin terpinggirkan.

<sup>1</sup> Sri Margana dan M. Nursam. "Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial". Yogyakarta: Ombak. 2010. Hlm 1.

<sup>2</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 2.

<sup>3</sup> Tome Pires. "Suma Oriental". Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2016. Hlm 267.

<sup>4</sup> "Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik (Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik)". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 2016. Hlm 19.

Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 1975, Kabupaten Gresik secara resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 pada tanggal 1 Nopember 1974. Peraturan Pemerintah tersebut menilai bahwa tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Surabaya adalah di Gresik yang menyebabkan perbedaan nama (Surabaya) dengan nama ibu kotanya (Gresik) yang secara psikologis dirasa kurang tepat dan serasi. Untuk itu pada tanggal 27 Februari 1975 nama Kabupaten Surabaya diganti menjadi Kabupaten Gresik dengan diresmikan oleh KDH. Tingkat 1 Jawa Timur, Moh. Noer.<sup>5</sup> Peristiwa perubahan status administrasi Kota Gresik yang mulanya bernama Kabupaten Surabaya kemudian berubah menjadi Kabupaten Gresik ini menjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi masyarakat Gresik.

Perubahan status administrasi Gresik ini secara tidak langsung menyebabkan nama Kabupaten Surabaya yang sebelumnya melekat menjadi terhapus. Gresik pun memiliki hak otonomi baru yakni hak untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang telah ada. Seluruh kegiatan pemerintahan pun secara berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik.<sup>6</sup>

Perubahan nama dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik membawa pengaruh yang besar terhadap Kota Gresik sendiri. Kota Gresik yang mulanya hanya berstatus sebagai kota kecamatan atau kawedanan harus membuat perubahan ataupun pembangunan agar dapat memiliki taraf yang seimbang seperti halnya sebuah Ibukota Kabupaten.

Sebagai wilayah pemerintah kabupaten, Gresik yang terbentuk pada tahun 1974 dipimpin oleh Bupati Letkol Laut H. Soeflan sekaligus sebagai bupati pertama yang membangun pusat pemerintahan di Gresik. Bupati Soeflan sebagai pemimpin Kabupaten Gresik yang menjabat sejak tahun 1973, melakukan berbagai upaya untuk membangun Kabupaten Gresik menjadi lebih baik lagi.

Dalam rangka pembangunan untuk mengembangkan diri, Kota Gresik yang berada ditengah-tengah gemuruh perdagangan, teknologi, ekonomi, serta industrialisasi yang kuat, menanamkan semangat pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Gresik yang baru menyandang status sebagai sebuah kabupaten atau kota mandiri dilandasi dengan kebanggaan masa lalu yang pernah menjadi masyarakat yang disegani di Nusantara.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas, sejarah mengenai perubahan status administrasi Kota Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Sejarah Perubahan Status Administrasi Kota Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974”**.

Dalam penulisan karya ilmiah sejarah batasan masalah terdiri dari dua hal, yaitu batasan spasial (*spatial scope*) dan batasan temporal (*temporal scope*). Pembatasan baik spasial maupun temporal memiliki tujuan agar lebih fokus dan mendalam, tidak terlalu luas. Batasan spasial yang dikaji pada penelitian ini ditekankan pada wilayah Gresik, sedangkan batasan temporal yang dipakai adalah tahun 1974. Alasan penelitian ini tertulis angka tahun 1974 karena pada tahun tersebut merupakan tahun dimana Gresik resmi menyandang status sebagai sebuah kota kabupaten, sekaligus menghapus nama Kabupaten Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang perubahan status administrasi Kota Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974?; (2) Bagaimana proses peralihan dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974?; dan (3) Bagaimana pengaruh perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diuraikan maksud dan tujuan penelitian ini, antara lain: (1) Mendeskripsikan latar belakang perubahan status administrasi Kota Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974; (2) Mendeskripsikan proses peralihan dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974; (3) Menganalisis pengaruh perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik tahun 1974.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diiharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai sejarah Kota Gresik serta dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk para pembaca dan peneliti berikutnya.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dalam konteks penelitian ini, termasuk dalam disiplin ilmu sejarah dengan metode sejarah.

Metode sejarah adalah suatu proses untuk mencari pembenaran sejarah, yang prosesnya berkaitan dengan sumber-sumber, evaluasi kritis, sintesis atau eksposisi hasil penelitian dan kritik. Maka dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri atas:

### 1. Heuristik (Penelusuran Sumber)

Heuristik merupakan sebuah kegiatan pencarian dan menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik bahasan yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang berlangsung atau

<sup>5</sup> Loemaksono. “Yang Tercecer dan Terlupakan di Kota Gresik (Kumpulan Kisah Bersejarah)”. Gresik: Tanpa Penerbit. 2012. hlm 12.

<sup>6</sup> Wisnu. “Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik”. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Surabaya. 2005. Hlm 10. Lihat juga “Gresik Selayang Pandang”. Gresik: Humas Pemda Gresik. 1990. Hlm 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>8</sup> Aminuddin Kasdi. “Memahami Sejarah”. Surabaya: Unesa Press. 2005. Hlm 10.

tidak langsung menceritakan tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau. Seorang peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat berbagai sumber terkait yang digunakan dalam karya terdahulu. Dengan demikian peneliti dapat menyaring sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukan, kemudian peneliti memperhatikan setiap jejak tersebut serta bagian-bagiannya, dengan selalu bertanya apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah.<sup>9</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap *Heuristik* adalah melakukan penelusuran sumber dan berbagai data yang dapat menjadi pendukung penelitian Sejarah Perubahan Status Administrasi Kabupaten Gresik tahun 1974, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Tahap *Heuristik* yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan sumber-sumber relevan yang terdiri dari hasil-hasil putusan Pemerintah Daerah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, buku terbitan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang berisi tentang kondisi sosial ekonomi Gresik tahun 1974 dan buku tentang proses pembangunan untuk memajukan Gresik pada masa Bupati Soefelan yang merupakan bupati pertama Kabupaten Gresik tahun 1974 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Gresik. Sumber lain diperoleh dari buku, koran lama, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 2. Kritik Sumber

Langkah kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk melihat tingkat keaslian sumber dan tingkat kredibilitas agar terhindar dari kepalsuan. Kritik sumber sendiri berarti menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber agar mendapatkan sumber yang autentik (asli).<sup>10</sup> Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan, langkah selanjutnya pada tahap ini penulis berusaha menyaring secara kritis terhadap sumber-sumber yang diperoleh apakah sumber tersebut telah relevan dengan kajian penelitian.

Adapun sumber yang penulis temukan dan dapat dijadikan sumber penelitian berupa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 dan buku terbitan khusus dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang diterbitkan tahun 1974 berisi tentang kondisi sosial dan ekonomi Gresik tahun 1974 serta proses penggalakan pembangunan yang dilakukan oleh bupati pertama Kabupaten Gresik, Bupati Soefelan dan buku penunjang lain yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini.

Pada langkah ini penulis melakukan uji keaslian sumber yang diperoleh, baik sumber primer maupun sumber sekunder dengan cara menyeleksi sumber yang ada dari segi fisik, semua autentisitasnya minimal dapat diuji berdasarkan dengan pertanyaan pokok seperti kapan sumber itu dibuat, dimana sumber itu dibuat, siapa yang membuat, dan apakah sumber tersebut dalam bentuk asli atau tidak.<sup>11</sup>

## 3. Interpretasi

Interpretasi disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusunlah fakta-fakta tersebut ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Dalam tahap ini penulis berusaha membagi fakta-fakta yang ada sesuai dengan tema atau bab yang dibahas. Penulisan fakta sejarah ini ditulis sesuai dengan runtutan rumusan masalah yang tertulis dan dijawab dengan dibagi menjadi menjadi beberapa bab kemudian menganalisis fakta-fakta sejarah yang diperoleh menjadi cerita sejarah yang kritis.

## 4. Historiografi

Merupakan fase terakhir dalam metode penelitian sejarah, historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap ini penulis menyusun rangkaian cerita yang sesuai dengan bab kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah kisah sejarah yang kritis. Penulisan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai akhir (kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Perubahan Status Administrasi Gresik

Latar belakang perubahan status administrasi Gresik tidak terlepas dari berbagai faktor baik faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut antara lain:

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Gresik merupakan sebuah wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan air laut (kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai tinggi 25 meter di atas permukaan air laut). Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak di antara titik 7° - 8° Lintang Selatan dan 112° - 113° Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.174,07 km<sup>2</sup> yang mencakup 977,80 Km<sup>2</sup> Pulau Jawa dan 196,27 Pulau Bawean.<sup>12</sup>

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya). Secara administrasi pemerintahan, wilayah kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, yaitu Kecamatan Dukun, Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Panceng, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, Kecamatan Bungah, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Dudung Abdurrahman. "Metode Penelitian Sejarah". Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999. Hlm 55.

<sup>10</sup> Kuntowijoyo. "Pengantar Ilmu Sejarah". Yogyakarta: Benteng. 1999. Hlm 90.

<sup>11</sup> Aminuddin Kasdi. "Memahami Sejarah". Surabaya: Unesa Press. 2005. Hlm 11.

<sup>12</sup> "Gresik Selayang Pandang". Gresik: Humas Pemda Gresik. 1980. Hlm 15.

<sup>13</sup> Ibid.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Madya Surabaya
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan<sup>14</sup>

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, serta dua kecamatan lain yang berada di Pulau Bawean (Tambak dan Sangkapura).<sup>15</sup>

Kabupaten Gresik memiliki areal seluas 116.817,210 ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 44.279,793 ha (37,92%), tanah tegalan seluas 439 ha (28,83%), pekarangan seluas 10.239,971 ha (8,81%), dan sisanya terdiri dari areal industri, tanah wakaf, dan lain-lain termasuk luas Pulau Bawean seluas 28.562,007 ha (24,45%).<sup>16</sup>

Kondisi pelapisan tanah di Kabupaten Gresik sebagian besar terdiri dari jenis tanah alluvial, grumusol, mediteran merah kuning, dan litosol. Berdasarkan ciri fisik tanahnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) Gresik bagian Utara, merupakan daerah yang memiliki tanah relatif kurang subur karena merupakan wilayah pegunungan kapur utara. Namun, sebagian dari daerah ini merupakan daerah hilir aliran sungai Bengawan Solo yang bermuara di Pantai Utara Kabupaten Gresik (Kecamatan Ujung Pangkah). Pada musim kemarau kondisi tanah di daerah ini menjadi sangat keras dan retak, sedangkan pada musim penghujan retakan tanah tersebut kembali rapat dengan cepat sehingga air hujan sulit untuk menembus ke bagian bawah. Oleh karena tanah yang relatif kurang subur, dan merupakan daerah yang gersang dan tandus, daerah Gresik bagian Utara ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai area industri manufaktur. (2) Gresik bagian Tengah, merupakan daerah yang sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian maupun pertambangan karena memiliki tanah yang relatif subur yakni didukung dengan adanya sungai-sungai kecil di sekitar, seperti Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, dan sungai-sungai kecil lainnya. (3) Gresik bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah yang cukup subur dan sebagian lagi berupa perbukitan (Gunung Kendeng). Sementara itu, Gresik bagian Tengah dan Selatan menjadi daerah yang cukup subur karena ditunjang dengan adanya pergantian musim yang teratur pada tiap tahunnya.<sup>17</sup>

Keadaan pelapisan tanah yang demikian secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi

pengembangan Kabupaten Gresik. tanah-tanah yang tandus dapat dimanfaatkan sebagai tempat industri pabrik. Hal itu dapat menunjang Gresik tumbuh menjadi daerah industri. Selain dapat memberikan pemasukan dana pada daerah tersebut, juga dapat menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar.<sup>18</sup>

Untuk keadaan tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Di sektor ini juga dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi peningkatan hidup dan kesejahteraan masyarakat Gresik.<sup>19</sup>

## 2. Kondisi Ekonomi

Dilihat dari segi letak geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di Selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. hal ini menjadikan Gresik tergabung dalam kawasan andalan Gerbang Kartosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Karena didukung oleh letaknya yang strategis itu pula menjadikan Gresik Sejak abad 11 telah tumbuh menjadi kota pelabuhan yang sangat terkenal.<sup>20</sup>

Dengan fasilitas Pelabuhan yang ada, Gresik telah dikenal oleh banyak orang dari berbagai wilayah maupun negara. Pelabuhan Gresik mampu menampung perahu-perahu layar dari satu daerah ke daerah lain, seperti dari Bawean, Kalimantan, Makassar, dan daerah nusantara bagian timur lainnya.<sup>21</sup>

Sebagian wilayah Gresik terdiri dari tanah yang tandus, gersang, dan berbukit-bukit, dengan kondisi tanah yang seperti ini banyak dimanfaatkan untuk industri manufaktur. Di Kabupaten Gresik sektor industri disusul dengan sektor perdagangan mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat, oleh sebab itu, selain disebut sebagai kota santri, Gresik juga disebut dengan kota industri. Walaupun disebut sebagai kota industri, dengan wilayah yang cukup luas dan meliputi daerah pedesaan sebagian masyarakat Gresik hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat Gresik selain sektor industri.<sup>22</sup>

Sejak akhir abad ke-19 M sebagian masyarakat Gresik telah tumbuh menjadi kapitalis-kapitalis kecil dengan mengandalkan industri rumah tangga dan perdagangan, seperti adanya pabrik kulit di desa Kebungson kecamatan Kota Gresik.<sup>23</sup> Selain itu, Gresik yang dikenal dengan Kota Santri banyak menghasilkan kerajinan yang bernuansa Islam seperti kopyah, sarung, mukenah, dan lain-lain.

Pada akhirnya kondisi geografis Gresik inilah yang mendorong masyarakat Gresik untuk mengandalkan pada industri dan perdagangan. Gejala ke arah ini menjadi

<sup>14</sup> Ibid. hlm 16.

<sup>15</sup> "Gresik Dalam Angka 2014". Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2014. Hlm 3.

<sup>16</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 16.

<sup>17</sup> Ibid. Hlm 18.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> De Graaf, HJ & Th. G. Th. Pigeaud. "Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16". Jakarta: Grafiti Pers. 1985. Hlm 17.

<sup>21</sup> "Kabupaten Gresik Membangun". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 1974. Hlm 223.

<sup>22</sup> "Gresik dalam angka 2012". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 2012. Hlm 6.

<sup>23</sup> Oemar Zainuddin. "Kota Gresik 1896-1916, Sejarah Sosial Budaya dan Ekonomi". Depok: Ruas. 2010. Hlm 31.

semakin nyata ketika berdiri Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953 kemudian dilanjutkan pada tahun 1959 dengan terbentuknya komunitas semen. momentum ini pun menjadi titik awal terjadinya proses industrialisasi di Gresik sehingga kota ini mendapat julukan kota industri di Jawa Timur.<sup>24</sup>

Kehadiran PT. Semen Gresik ini telah berperan besar bagi perluasan Kota Gresik. Proses perluasan wilayah ini akan terlihat jelas apabila membandingkan lingkaran geografis Kota Gresik sebelum dan sesudah hadirnya Pabrik Semen tersebut. Seperti kawasan Kebomas yang semula merupakan daerah kosong akhirnya menjadi kawasan terbuka setelah hadirnya Pabrik Semen Gresik, hal ini dikarenakan hadirnya Pabrik Semen Gresik yang berlokasi di Kecamatan Kebomas ini diikuti dengan perkembangan perkampungan karyawan pabrik yang berjajar melingkari kawasan pabrik. Hal ini mendorong penduduk setempat untuk mendirikan fasilitas pemondokan bagi karyawan pabrik, bahkan ada yang menyewakan rumahnya kepada karyawan pabrik. Warung dan toko-toko pun berangsur-angsur hadir disekeliling pabrik untuk ikut serta melengkapi fasilitas perkampungan beserta komunitasnya.<sup>25</sup>

Perluasan kota tersebut terus berlanjut didukung dengan hadirnya industri-industri lain yang berdiri disekitar kawasan Pabrik Semen Gresik. pada tahun 1970-an berdirilah PT. Petrokimia Gresik yang berada di sebelah barat Pabrik Semen Gresik, di sebelah selatan tepatnya di Kampung Sidorukun berdiri PT. Nippon Paint yang merupakan pabrik cat, di sebelah timur Kampung Segoromadu berdiri PT. Nusantara Plywood (pabrik pengolahan kayu). Kehadiran pabrik-pabrik tersebut menjadikan Gresik sebagai sebuah kawasan industri yang besar dan berpengaruh sehingga disebut dengan kota industri.<sup>26</sup>

Hadirnya pabrik-pabrik tersebut secara tidak langsung ikut menjadi salah satu faktor pendukung diperolehnya kembali status sebagai kota kabupaten berdasarkan SK Mendagri No. 38 Tahun 1974.

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Gresik tergolong sebagai masyarakat yang plural atau terdiri dari berbagai macam etnis. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa dan Madura, sebagian lainnya berasal dari Arab, Cina dan beberapa suku di Indonesia lainnya.

Aktivitas etnis Jawa dan Madura mendominasi segala aspek kehidupan sosial di Gresik baik yang di desa maupun di kota. Sementara itu etnis Cina dan Arab banyak dijumpai di kota-kota sebagai pedagang.<sup>27</sup>

Hidup sebagai kota pelabuhan yang terbuka hingga memungkinkan untuk dihuni masyarakat dari berbagai

etnis, tetapi kehidupan masyarakat Gresik berjalan secara damai dan rukun. Sebagian besar masyarakat dari berbagai etnis tersebut hidup berkelompok dalam suatu lokasi yang dihuni oleh sesama etnis, seperti etnis Arab bertempat tinggal di Kampung Gapuro dan Pulo Pancikan (sebelah selatan alon-alon Gresik), etnis Cina tinggal di Kampung Pecinan (sebelah timur alon-alon), etnis Eropa bermukim di sebelah utara alon-alon, dan etnis Madura menyebar di sekitar pantai dekat pelabuhan.<sup>28</sup>

Walaupun tergolong masyarakat plural, sebagai pusat perkembangan Islam menjadikan Gresik memiliki kehidupan agama yang kuat dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai religius Islami. Ajaran Islam seolah-olah telah mendarah-daging sehingga menjadi jati diri masyarakat Gresik yang sulit dihapus. Hal inilah yang mewarnai pandangan serta sikap hidup sehari-hari, terutama dalam ungkapan-ungkapan rasa batin seperti dalam olah kesenian masyarakatnya.<sup>29</sup> Tradisi budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Gresik yang menonjol antara lain seperti ritual ziarah makam ulama atau tokoh masyarakat, haul atau khol ulama-ulama besar, malam selawe ramadhan, pasar bandeng, dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Nafas keislaman menguasai setiap kesenian tradisional Gresik yang diselenggarakan berkaitan dengan berbagai kegiatan upacara, misalnya pada acara perkawinan, peringatan Maulid Nabi, haul, dan acara keislaman lainnya lazim diramaikan dengan kegiatan samrah, kasidah, ataupun hadrah.<sup>31</sup>

Kehidupan sosial masyarakat Gresik secara umum dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang diperoleh lewat pendidikan agama. Sebelum pendidikan agama (selain pesantren) disatukan dalam sistem pendidikan formal seperti sekarang ini, yang berlaku adalah pendidikan agama dengan metode tradisional, yakni sistem pesantren.<sup>32</sup>

Sistem pendidikan pesantren atau pondok sangat dominan di Gresik jauh sebelum zaman kolonial. Melalui pendidikan di pondok pesantren inilah Islam dapat berkembang dengan baik di Gresik dan sekitarnya.

Beberapa pondok pesantren yang masih nampak keberadaannya adalah:

1. Pondok Pesantren Maskumambang di Kecamatan Dukun berdiri sejak tahun 1859 M oleh K.H. Abdul Djabbar.
2. Pondok Pesantren Sampurnan di Kecamatan Bungah yang kemudian berganti nama menjadi Pondok Pesantren Qomaruddin berdiri sejak tahun 1753 M.
3. Pondok Pesantren Ihyaul Ulum di Kecamatan Dukun.

<sup>24</sup> Purnawan Basundoro. "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respons Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik". Humaniora. Vol XIII No. 2. 2001. Hlm 136.

<sup>25</sup> Mustakim. "Sejarah Gresik Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Lokal untuk SMP/MTs Kelas VIII-IX". Surabaya: CV. Andhum Berkat. 2012. Hlm 111.

<sup>26</sup> Ibid. hlm 115.

<sup>27</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 36.

<sup>28</sup> Mustakim. "Gresik Dalam Lintasan Lima Zaman". Surabaya: Pustaka Eureka. 2010. Hlm 14.

<sup>29</sup> Oemar Zainuddin. "Kota Gresik 1896-1916". Jakarta: Ruas. 2010. Hlm 55.

<sup>30</sup> Mustakim. "Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik". Gresik: Dinas P&K Kabupaten Gresik. 2015. Hlm 16.

<sup>31</sup> Dukut Imam Widodo. "Grissee Tempo Doeloe". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 2004. Hlm 178.

<sup>32</sup> Mustakim. "Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik". Op. cit. 2015. hlm 17.

4. Pondok Pesantren Blandongan yang berada di sebelah Barat Pelabuhan Gresik, dan masih banyak lainnya.<sup>33</sup>

Selain sistem pendidikan di pondok pesantren, pendidikan agama juga dilakukan di langgar-langgar atau surau-suaru yang ada disetiap kampung dengan dipimpin oleh kiai masing-masing. Karena banyaknya pondok pesantren yang didirikan di Gresik, Gresik pun disebut sebagai kota santri.<sup>34</sup>

Secara sosial budaya tidak terjadi gesekan ataupun konflik yang nampak pada saat itu, namun terdapat perbedaan pada bidang kondisi sosio kultural masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini kondisi sosio kultural Gresik cenderung lebih 'santri' atau lebih religious dibandingkan dengan masyarakat Surabaya yang lebih plural. Sebagai contoh ketika orang Surabaya mengucapkan kata 'meso' dianggap sudah biasa, namun di Gresik masih terdapat adab yang melarang untuk mengucapkan kata 'meso'.<sup>35</sup>

#### 4. Kondisi Politik

Aktivitas pemerintahan di Gresik ditandai dengan berdirinya Kerajaan Giri Kedaton, dipimpin oleh Sunan Giri yang bernama Muhammad Ainul Yakin bergelar Prabu Satmata pada tahun 1449 M. pada saat itu beliau menggantikan Sunan Ampel yang merupakan "ketua" Para Wali.<sup>36</sup> Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik dan ketatanegaraan. Beliau pernah menyusun peraturan ketataprajaan dan pedoman tata cara di keraton. Pandangan politiknya pun menjadi rujukan.<sup>37</sup>

Atas usulan Sunan Kalijaga, pada tanggal 9 Maret 1487 atau bertepatan dengan 12 Robiul Awal 897 H Sunan Giri diberi gelar Prabu Satmaka atau Ratu Tunggal Khalifatul Mu'minin bin Sayyid Ya'qub alias Syaich Wali Lanang alias Maulana Ishaq Pasai. Tanggal pemberian gelar tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Gresik.<sup>38</sup>

Penobatan Sunan Giri sebagai raja tersebut bisa diartikan sebagai tonggak sejarah lahirnya dinasti pemerintahan baru di Kerajaan Giri Kedaton. Sebab sebelum Kerajaan Giri Kedaton berdiri Gresik merupakan bagian wilayah "hegemoni" Kerajaan Majapahit.<sup>39</sup>

Setelah Kerajaan Giri Kedaton hancur, pada abad ke-17 M, Gresik mulai menjadi kabupaten yang bernama Kabupaten Tandes. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan nama "Negeri Tandes" pada makam Bupati Gresik terdahulu. Istilah Tandes ini merujuk pada suatu daerah yang kini bernama Gresik. konon nama Tandes dalam

naskah Jawa memang sering dipakai untuk menyebut Gresik, dan dapat dianggap sebagai istilah pengganti.<sup>40</sup>

Selain pernah menjadi kerajaan dengan nama Giri Kedaton dan menjadi Kabupaten bernama Kabupaten Tandes, Gresik dalam sejarahnya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Surabaya dan berstatus sebagai kawedanan. Istilah Kabupaten Tandes pun dihapuskan dan dibentuk Kabupaten baru di Surabaya. Dimana pada saat itu Kota Surabaya masih berstatus sebagai Kota Praja (Gemeente). Bupati-pun dipindahkan dari Tandes (kini Gresik) ke Surabaya.<sup>41</sup> Ketiganya merupakan tonggak sejarah yang mengantarkan Kabupaten Gresik menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974 sampai sekarang ini.

#### B. Proses Peralihan Dari Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974

Proses peralihan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik secara garis besar terjadi ketika Gresik yang pada awalnya berstatus sebagai ibukota dari Kabupaten Surabaya. Status ini ditetapkan oleh Mr. Assat yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (pemangku jabatan sementara). Dari sini terdapat perbedaan nama kabupaten dengan ibukotanya yakni Kabupaten Surabaya dengan Ibukota Gresik yang dalam perkembangannya perbedaan tersebut secara psikologi dirasa kurang tepat dan serasi.

Didukung pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 yang berisi tentang perubahan batas wilayah Kota Pradja (nama Kota Madya Surabaya) pada saat itu yang menambah 5 Kecamatan dari Kabupaten Surabaya (sekarang Gresik) yakni Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Karangpilang. Kebijakan ini secara otomatis semakin menjauhkan pusat Pemerintahan Kabupaten Surabaya dengan wilayah yang diperintah.<sup>42</sup>

Selain itu juga jika Gresik masih tetap menjadi Kabupaten Surabaya, anggota DPRDnya tentunya mayoritas bukan orang Gresik. Dengan berdirinya Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten dapat lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan Kabupaten Gresik dan mengetahui dengan pasti dan baik tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Gresik, sehingga suasana dan nuansa kegresikannya itu lebih nampak.<sup>43</sup>

Ketika Surabaya dan Gresik menjadi satu akan sulit juga bagi pemerintah daerah untuk memimpin Kota Madya Surabaya dan Kabupaten Surabaya karena wilayah

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid. hlm 18.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kris Adji AW. Selaku Ketua Komunitas Mata Seger (Masyarakat Pecinta Sejarah Gresik) pada tanggal 20 Juni 2020.

<sup>36</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 27. Lihat juga De Graaf, H.J. & Pegeaud, Th. G. Th. "Kerajaan Islam Di Jawa". Jakarta: Grafiti Press. 1985. Hlm 150.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim S.S., M.Si., selaku Sejarawan Indonesia Jawa Timur pada tanggal 10 Maret 2020.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 6.

<sup>40</sup> Dukat Imam Widodo. "Grissee Tempo Doeloe". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 2004. Hlm 112.

<sup>41</sup> Umar Hasyim. "Sunan Giri: Pemerintahan Ulama di Giri Kedaton". Surabaya: Menara Kudus. 1999. Hlm 79.

<sup>42</sup> "Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik (Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik)". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 2016. Hlm 169.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kris Adji AW. Selaku Ketua Komunitas Mata Seger (Masyarakat Pecinta Sejarah Gresik) pada tanggal 20 Juni 2020.

Gresik sangat luas, perbatasannya hingga lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo.<sup>44</sup>

Bersamaan dengan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya melalui surat keputusannya tertanggal 20 Maret 1974 Nomor Perda/2/DPRD-II/74 mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya dihapus dan diganti dengan nama Kabupaten Gresik. Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya tersebut mendapat dukungan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui suratnya pada tanggal 25 Maret 1974 Nomor HK. 4105/30/III/74, dan juga mendapat dukungan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur. Namun sebelum Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur menurunkan surat usulan perubahan nama kabupaten, beliau memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dibawah pimpinan Bupati Soefelan untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, termasuk jawatan-jawatan vertikal yang masih bertempat atau berkantor di Kotamadya Surabaya. Selanjutnya disusul dengan pemindahan tempat tinggal Bupati Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, Bupati Soefelan dari Jalan Gentengkali, Kotamadya Surabaya ke Kota Gresik. Perpindahan ini dilakukan secara berangsur-angsur.<sup>45</sup>

Setelah dengan nyata Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dapat dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya dari kantor pusatnya di Kota Gresik, barulah Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur, Gubernur Moh. Noer bersedia mengusulkan perubahan nama tersebut ke pihak atasan, yaitu melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat dalam suratnya pada tanggal 30 Maret 1974 Nomor Pem. II/2024/157. Ttpr yang mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya dirubah menjadi Kabupaten Gresik.

Selanjutnya pengusulan pun dikabulkan melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1974 tanggal 1 Nopember 1974 secara resmi nama Kabupaten Surabaya dihapuskan dan diganti dengan nama Kabupaten Gresik dengan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Soeharto dan Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudarmono.<sup>46</sup>

Sejak ditetapkannya PP No. 38 Tahun 1974 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka daerah ini secara resmi disebut sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik pada tanggal 27 Februari 1975 dengan ibu kotanya Kota Gresik dan pemerintah daerahnya disebut Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik.<sup>47</sup>

Peristiwa perubahan nama dan pemindahan de facto kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik menjadi suatu tonggak bersejarah dalam mengembangkan daerah yang telah lama terlupakan.

### C. Pengaruh Perubahan Status Administrasi Gresik Tahun 1974

Perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik merupakan peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat Gresik. Sejak diputuskannya Gresik menjadi sebuah kabupaten mandiri pada tahun 1974 memberikan pengaruh yang besar terhadap Kota Gresik. Gresik yang semula hanya berstatus sebagai kecamatan atau kawedanan harus melakukan pembangunan sedemikian rupa agar memiliki taraf yang sesuai dengan statusnya yang telah menjadi sebuah Kabupaten.

Semangat pembangunan telah digalakkan pada masa Bupati Soesanto Bangunnagoro, yang merupakan Bupati Pemerintah Kabupaten Surabaya sebelum Bupati Soefelan. Bupati Soesanto Bangunnagoro atas perintah Gubernur Noer membangun sarana dan prasarana pemerintahan di Gresik yang dapat menunjang terwujudnya sebuah ibukota kabupaten.<sup>48</sup>

Ketika masa jabatan Bupati Soesanto Bangunnagoro habis, proyek-proyek pembangunan pun dilanjutkan oleh Bupati Kolonel Laut Soefelan yang dilantik menjadi Bupati Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1973. Pada awal pemerintahan Bupati Soefelan (1973/1974) telah dibangun kantor Pendopo Kabupaten Gresik, Kantor Bappeda, sarana ibadah di lingkungan kantor Pemda Gresik, serta rehabilitasi kantor-kantor kecamatan yang seluruhnya berjumlah 15 buah, pembangunan jalan disetiap kecamatan sebanyak 7 buah, prasarana pendidikan 2 buah, dan prasarana lain sebanyak 11 buah, yang seluruhnya menghabiskan biaya sebesar 94.663.839,57.<sup>49</sup>

Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik dibawah pimpinan Bupati Soefelan ini merupakan realisasi dari rencana program Pembangunan Lima Tahun I. Pada akhir tahap Pelita I tersebut (1974/1975) pembangunan di sarana pemerintahan tetap diprioritaskan sedangkan sarana-prasarana lain juga dibangun. Pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pembangunan sarana pemerintahan sebanyak 16 buah, perhubungan 5 buah, kesehatan 4 buah, produksi sebuah, dan prasarana pendidikan sebuah, dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 60.847.635,68.<sup>50</sup>

Pembangunan dan pembenahan sarana prasarana dilakukan hingga ke pelosok desa hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan serta meratakan pembangunan di Kabupaten Gresik pasca diberikannya status kabupaten.

Dampak positif yang lainnya juga terlihat pada pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik. Pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik sangat erat kaitannya dengan rencana pembangunan industri Kota Madya Surabaya yang

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Afhani Hawari, S.Pd, M.Pd selaku menantu dari Letkol Cpl. H. Abdoel Wachid (Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ke 3 Periode 1972-1977 sekaligus cicit dari istri RP. H. Mohammad Noer selaku Gubernur Jawa Timur 1967-1976) pada tanggal 16 April 2020.

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1974.

<sup>47</sup> "Kabupaten Gresik Membangun". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 1974. Hlm 223.

<sup>48</sup> "Sejarah Singkat Kabupaten Gresik". Gresik: Humas Pemda. 1980. Hlm 24.

<sup>49</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 43. Lihat juga "Kabupaten Gresik Membangun". Op. cit. Hlm 99.

<sup>50</sup> Ibid.

menetapkan Kabupaten Gresik masuk dalam wilayah Gerbang Kertasusilo. Intensitas perkembangan industri yang semakin meningkat di Kota Madya Surabaya menyebabkan industrialisasi tersebut melebar ke kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Kota Madya, yaitu kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Gerbang Kertasusila, termasuk Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan.<sup>51</sup>

Kondisi geografis Kabupaten Gresik yang sebagian daerahnya terdiri dari daerah karang dengan bebatuan kapur dan tanah yang kuat, memiliki pelabuhan, serta letaknya yang berdekatan dengan Kota Madya Surabaya membuat Kabupaten Gresik memiliki nilai positif tersendiri bagi para investor untuk membangun pabrik di Gresik.<sup>52</sup>

Beberapa industri yang didirikan di Gresik setelah berdirinya Kabupaten Gresik (1975) selain Pabrik Semen Gresik dan Pabrik Petrokimia yang sudah ada sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Industri	Ket.
PT. United Trans Ocean Marine Paint Co	Pabrik cat dan kaleng	PMA
PT. Nusantara Plywood	Pabrik kayu	PMDN
PT. Eternit Gresik	Pabrik eternit	PMA
PT. Sumber Mas	Pabrik kayu	PMDN
PT. Wihatta Karya Agung	Pabrik karung plastik	PMDN
PT. Surabaya Mekabok	Pabrik kanton box dan paku	PMDN
PT. Surabaya Wire	Pabrik kawat	PMA
PT. Miwon Indonesia	Pabrik bumbu masak	PMA
PT. Surya Kertas	Pabrik kertas	PMDN
PT. Candra Dirgantara	Pabrik kayu	PMDN

Sumber: Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 91. Lihat juga buku "Kabupaten Gresik Membangun". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 1974. Hlm 144.

Disamping industri-industri besar diatas, di Kabupaten Gresik juga berkembang industri rumah tangga

(*home industry*) yang juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Gresik. Industri rumah tangga ini banyak dikerjakan oleh penduduk yang kurang memiliki tanah untuk usaha pertanian atau pertambakan. Mereka umumnya pengerajin, seperti pengerajin tas dari kulit imitasi, pengerajin emas (asli maupun imitasi/kricikan), pengerajin songkok atau kopiah, sarung tenun (ATBM / Alat Tenun Bukan Mesin), sepatu, ikat pinggang, tikar, gerabah, anyaman bambu, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu juga terdapat kerajinan terutama dalam hal pembuatan makanan atau minuman tradisional, seperti pudak, jenang jubung (dodol), ayas, otak-otak bandeng, nasi krawu (sega krawu), nasi roomo (sega roomo), nasi menir (sega menir), kerupuk ikan, petis, terasi, tuak, dan legen.<sup>53</sup>

Kehadiran industri-industri besar maupun kecil di kota yang berskala kecil seperti Kota Gresik membawa dampak yang sangat besar bagi keberadaan kota tersebut dan bagi masyarakat sekitarnya, terutama berkaitan dengan perkembangan kota tersebut.<sup>54</sup>

Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut baik perusahaan besar, perusahaan sedang maupun perusahaan kecil (*home industry*) memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan perekonomian di Gresik, selain dapat menciptakan lapangan kerja, keberadaan industri-industri tersebut juga dapat memberikan peluang atau kesempatan kerja semakin besar bagi penduduk Gresik dan sekitarnya. Pedagang banyak bermunculan di sekitar pabrik, demikian juga dengan jasa pemondokan atau kos-kosan. Apalagi sejak tahun 1980-an semakin banyak lagi pabrik yang berdiri mengelilingi Kabupaten Gresik, mulai dari daerah pelabuhan, daerah Kebomas, daerah Segoromadu, Sidorukun, Karangkring, dan sekitarnya.<sup>55</sup> Selain membuat semakin meningkatnya mobilitas tenaga kerja di Kabupaten Gresik, secara tidak langsung juga berpengaruh menimbulkan arus urbanisasi ke pusat-pusat industri di perkotaan. Untuk mengatasi para urban yang semakin meningkat beberapa sarana infrastruktur pun dibangun seperti terminal, pasar, pertokoan, dan perumahan.<sup>56</sup>

Sebelum ditetapkannya Gresik menjadi sebuah kabupaten mandiri, hadirnya pabrik-pabrik besar di Gresik seperti Pabrik Semen Gresik dan PT. Petrokimia rata-rata ditanggapi oleh masyarakat Gresik dengan sikap *apatis* atau acuh tak acuh. Salah satu bentuknya adalah mereka tidak mau dijadikan pekerja atau pegawai di pabrik-pabrik tersebut, walaupun pendidikan mereka ada yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena sikap kemandirian mereka dalam bidang ekonomi. Bagi mereka lebih baik menjadi pedagang atau pengerajin kecil yang hidupnya bebas, tidak bergantung pada orang lain, dan kerjanya tidak terikat oleh

<sup>51</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Op. cit. Hlm 91. Lihat juga "Surabaya 689 Tahun" Surabaya: Humas. 1982. Hlm 25.

<sup>52</sup> "Gresik Selayang Pandang". Gresik: Humas Pemda. 1980. Hlm 10.

<sup>53</sup> Mustakim. "Sejarah Gresik Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Lokal untuk SMP/MTs Kelas VIII-IX". Surabaya: CV. Andhum Berkat. 2012. Hlm 27.

<sup>54</sup> Purnawan Basundoro. "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respons Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik". Humaniora. Vol XIII No. 2. 2001. Hlm 134.

<sup>55</sup> Mustakim. "Sejarah Gresik Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Lokal untuk SMP/MTs Kelas VIII-IX". Op. cit. Hlm 116.

<sup>56</sup> Wisnu. "Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik". Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2005. Hlm 9. Lihat juga "Kabupaten Gresik Membangun". Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik. 1974. Hlm 70.

berbagai macam aturan dan waktu daripada menjadi buruh yang bekerja atas perintah orang lain.<sup>57</sup>

Situasi ini pun mulai berubah sekitar tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, dimana pabrik-pabrik besar di Kabupaten Gresik semakin banyak dan kehadirannya sudah mulai diresapi oleh masyarakat Gresik sebagai sebuah keberuntungan. Ditambah lagi dengan pabrik-pabrik besar tersebut menyediakan fasilitas untuk kepentingan umum secara luas seperti rumah sakit, sarana olahraga, pertokoan, dan lain-lain yang jelas sangat menguntungkan bagi masyarakat Gresik. Orang Gresik yang berpendidikan pun mulai terserap menjadi bagian dari pabrik-pabrik besar tersebut.

Kondisi ini didorong pula dengan kebijakan pemerintah pusat pada Tahun 1975 dimana Presiden Republik Indonesia, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pendirian sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Anak-anak di Kabupaten Gresik dan sekitarnya pun berbondong-bondong meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan harapan setelah lulus dapat bekerja di pabrik dengan gaji yang tinggi.

Secara tidak langsung, adanya industrialisasi yang mulai marak di Kabupaten Gresik telah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Gresik.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagai penutup penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan yang sekiranya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dari hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan judul skripsi Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik Dari Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974: sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan status administrasi Gresik tidak terlepas dari faktor kondisi geografis, ekonomi, sosial, politik, dan jejak historis Gresik.

Letak geografis Kabupaten Gresik yang cukup strategis yakni terletak di tepi pantai, memiliki pelabuhan yang sangat menunjang pertumbuhan ekonominya, serta terletak berdekatan dengan Kota Madya Surabaya yang menjadi pusat perdagangan di wilayah Timur Indonesia. Berdasarkan letaknya yang sangat strategis ini Gresik masuk dalam wilayah Gerbang Kertasusila dan menjadi salah satu kabupaten penyangga utama Kota Surabaya bersama Sidoarjo.

Masyarakat Gresik tergolong sebagai masyarakat yang plural atau terdiri dari berbagai macam etnis. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa dan Madura, sebagian lainnya berasal dari Arab, Cina dan beberapa suku di Indonesia lainnya. Walaupun hidup sebagai kota pelabuhan yang terbuka hingga memungkinkan untuk dihuni masyarakat dari berbagai etnis, tetapi kehidupan masyarakat Gresik berjalan secara damai dan rukun.

Dari segi ekonomi, Kabupaten Gresik sejak abad ke-11 telah tumbuh menjadi kota pelabuhan yang sangat

terkenal. Pelabuhan Gresik ini mampu menampung perahu-perahu layar dari satu daerah ke daerah lain, seperti dari Bawean, Kalimantan, Makassar, dan daerah nusantara bagian timur lainnya. Selain itu juga Kabupaten Gresik yang sebagian daerahnya ditunjang oleh kondisi tanah yang kuat dimanfaatkan untuk industri manufacturing, sedangkan sebagian daerah lain yang memiliki tanah subur dimanfaatkan untuk pertanian dan pertambakan. Pada awal tahun 1953, didirikan Pabrik Semen Gresik dan menjadi titik awal industrialisasi di Gresik.

Secara politis, sebelum resmi menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974, Gresik selain pernah menjadi kerajaan dengan nama Giri Kedaton dan menjadi Kabupaten bernama Kabupaten Tandes, Gresik dalam sejarahnya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Surabaya dan berstatus sebagai kawedanan. Istilah Kabupaten Tandes pun dihapuskan dan dibentuk Kabupaten baru di Surabaya. Dimana pada saat itu Kota Surabaya masih berstatus sebagai Kota Praja (Gemeente). Bupati nya pun dipindahkan dari Tandes (kini Gresik) ke Surabaya. Ketiganya merupakan tonggak sejarah yang mengantarkan Kabupaten Gresik menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974 sampai sekarang ini.

Pengaruh dari terbentuknya Kabupaten Gresik ini dapat terlihat pada banyaknya proyek pembangunan yang digalakkan pada masa pemerintahan Bupati Soefelan. Pembangunan ini diprioritaskan pada prasarana pemerintahan seperti kantor pemerintahan, kantor kecamatan dan lain sebagainya, kendati demikian pembangunan sarana dan prasarana lain juga terus berjalan. Selain pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Gresik yang semakin meningkat guna memajukan Kabupaten Gresik, dampak positif yang lainnya juga terlihat pada pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik. pertumbuhan industri di Gresik pasca terbentuknya Kabupaten Gresik tahun 1974 semakin meningkat, keberadaan industri-industri tersebut memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan perekonomian di Gresik, selain dapat menciptakan lapangan kerja, keberadaan industri-industri tersebut juga dapat memberikan peluang atau kesempatan kerja semakin besar bagi penduduk Gresik dan sekitarnya.

### Saran

Penelitian yang berjudul "Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974" ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai sejarah Kabupaten Gresik. Peristiwa terbentuknya Kabupaten Gresik menjadi kabupaten mandiri tersebut dijadikan sebagai motivasi bagi masyarakat Gresik khususnya pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjaga nama baik Kabupaten Gresik agar tetap harum, selain itu juga peristiwa ini diharapkan dapat menjadi semangat tersendiri bagi masyarakat Gresik untuk bersatu padu mensukseskan pembangunan untuk menciptakan Kabupaten Gresik yang lebih baik.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oemar Zainuddin selaku Sejarawan Gresik pada tanggal 16 Maret 2020

<sup>58</sup> Mustakim. "Sejarah Gresik Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Lokal untuk SMP/MTs Kelas VIII-IX". Op. cit. Hlm 117.

**DAFTAR PUSTAKA****Terbitan khusus**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974

**Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Mustakim, S.S., M.Si., selaku Sejarawan Indonesia Jawa Timur pada tanggal 10 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Oemar Zainuddin selaku Sejarawan Gresik pada tanggal 16 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak H. Afnani Hawari, S.Pd, M.Pd selaku menantu dari Letkol Cpl. H. Abdoel Wachid (Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ke 3 Periode 1972-1977 sekaligus cicit dari istri RP. H. Mohammad Noer selaku Gubernur Jawa Timur 1967-1976) pada tanggal 16 April 2020.

Wawancara dengan Bapak Kris Adji AW. Selaku Ketua Komunitas Mata Seger (Masyarakat Pecinta Sejarah Gresik) pada tanggal 20 Juni 2020.

**Buku**

Abas, Abdul. 2016. *Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik (Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik)*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik.

Abdullah, Taufik. 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Gresik 2015*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2018. *Gresik dalam Angka 2018*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2013. *Potensi dan Produk Unggulan Jawa Timur: Kabupaten Gresik*. Surabaya: Bappeda Jawa Timur.

Hadinoto. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa: Abad XVII Sampai Pertengahan Abad XX Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*. Yogyakarta: Ombak.

Hasyim, Umar. 1999. *Sunan Giri: Pemerintahan Ulama di Giri Kedaton*. Surabaya: Menara Kudus.

Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kasdi, Aminuddin dan Suwandi. 1997. "Perkembangan Kota Gresik Sebagai Kota Dagang pada Abad XV-XVIII (Kajian Sejarah Lokal Berdasarkan Wawasan Sosial Ekonomi)". Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.

Makkelo, Ilham Daeng. 2017. *Sejarah Perkotaan: Tinjauan Historiografis dan Tematis*. Lensa Budaya. Vol. 12, No. 2.

Margana, Sri. 2010. *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.

Mustakim. 2012. *Sejarah Gresik Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Lokal untuk SMP/MTs Kelas VIII-IX*. Surabaya: CV. Andhum Berkas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. 1975. *Kabupaten Gresik Membangun*. Gresik: Pemerintah Kota Gresik.

Sardiman AM. 2004. *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Tim 3K. 1980. *Program Gresik Kota Berhias Iman*. Gresik: Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Tim Penyusun Buku Gresik Dalam Perspektif Sejarah. 2003. *Gresik Dalam Perspektif Sejarah*. Gresik: Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Tim Penyusun Sejarah Gresik. 1991. *Kota Gresik Sebuah Perspektif Sejarah Dan Hari Jadi Gresik*. Gresik: Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik.

Widodo, Dukut Imam dkk. 2004. *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik.

Wisnu. 2005. *Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.

Zaenuddin, Oemar. 2010. *Kota Gresik 1896-1916: Sejarah Sosial Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: Ruas.

(Tanpa nama pengarang). 1976. *Petunjuk Metropolitan Surabaya dan Jatim*. Surabaya: Penerangan Daerah Militer VIII/Brawijaya.

(Tanpa nama pengarang). 1978. *685 Hari Jadi Kota Surabaya*. Surabaya: Humas & Protokol Kodya Surabaya.

(Tanpa nama pengarang). 1975. *Kabupaten Gresik Membangun*. Gresik: Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik.

(Tanpa nama pengarang). 1980. *Gresik Selayang Pandang*. Gresik: Humas Pemda.

**Jurnal Ilmiah**

Basundoro, Purnawan. 2001. "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik". *Humaniora*. XII.